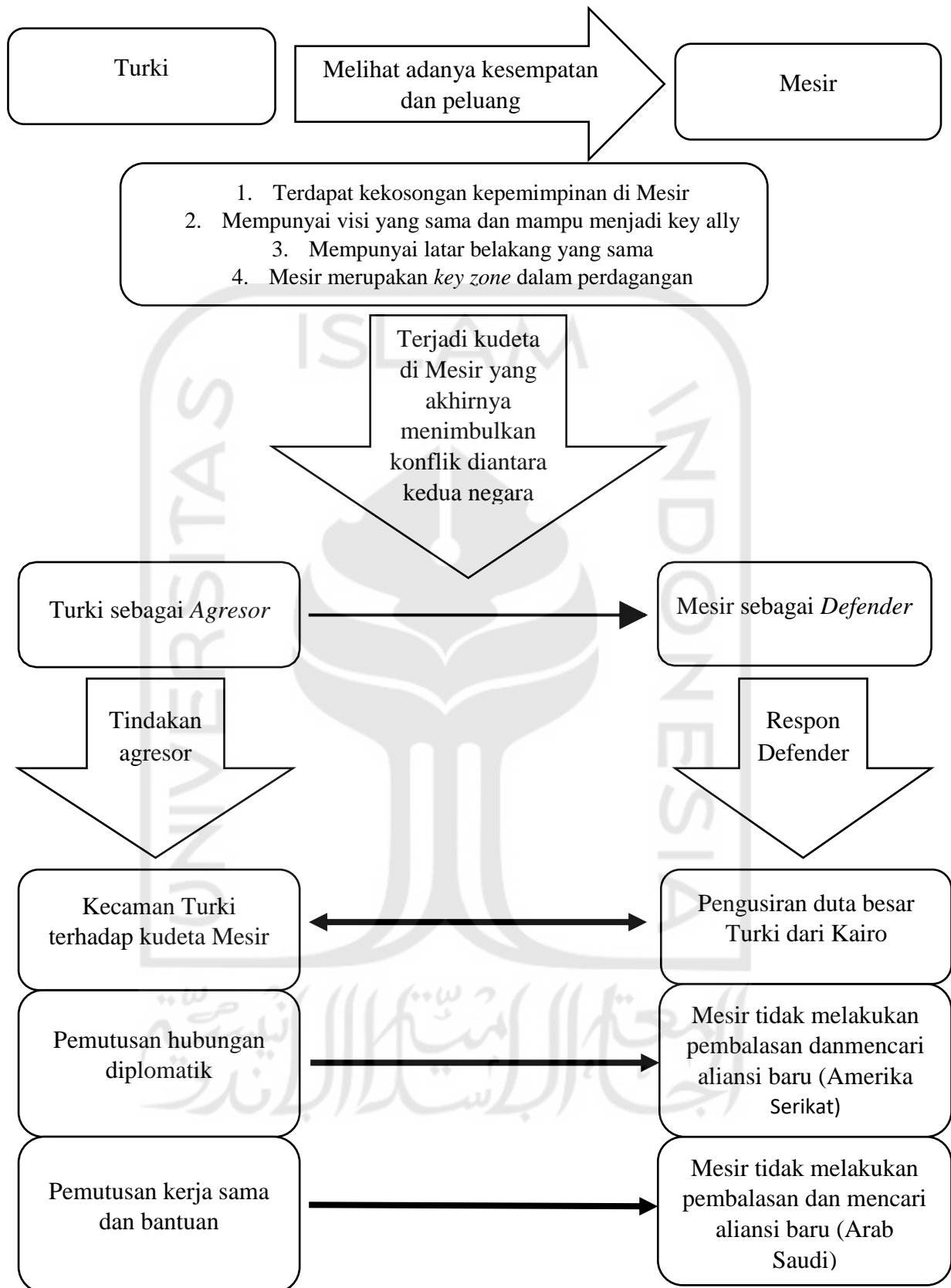


BAB II

ANALISIS TURKI SEBAGAI AGRESOR

Seperti yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, terkait landasan teori, penulis menggunakan teori Konflik Sosial dengan model *Agresor-Defender*. Pada model ini, terdapat dua aktor berbeda yang memiliki tujuan yang berbeda. Yaitu *Agresor* dan *Defender*. *Agresor* merupakan pihak yang melihat adanya kesempatan dan peluang yang dapat membantu menjalankan kepentingannya dan berusaha menyerang dan melakukan berbagai macam cara untuk dapat mencapai tujuannya. Sedangkan *defender*, hanya aktor yang berusaha bertahan dan meningkatkan pertahanannya agar dapat bertahan dari serangan *Agresor*. Pada bab ini, penulis akan menganalisis terkait Turki sebagai *Agresor* dan tindakan apa saja yang dilakukan oleh Turki. Sebelum menjelaskan lebih detail terkait *agresor*, penulis membentuk sebuah bagan agar lebih mudah di pahami terkait model ini.



Gambar 3. Tindakan Agresor dan Respon Defender

2.1 Turki Sebagai Agresor

Seperti yang telah dijelaskan terkait model *Agresor* dan *Defender*, tidak ada parameter mengenai *Agresor* dan *Defender*. Namun hanya dijelaskan bahwa pihak yang menjadi *Agresor* merupakan pihak yang mempunyai tujuan dan melakukan segala cara agar tujuannya tercapai. Sedangkan *Defender* hanya akan bereaksi tanpa membalas perlakuan *Agresor*. Sehingga dalam model ini, siapa saja dapat menjadi *Agresor* ketika mereka mempunyai tujuan dan pihak lain akan menjadi *Defender* selama tidak membalas dan hanya melakukan pertahanan (Pruitt & Rubin, 2004, hal. 200-201)

Melihat bagan diatas, dapat dilihat beberapa tujuan agresor terhadap Mesir. Turki melihat beberapa peluang yang dianggap mampu untuk mencapai tujuannya di Timur Tengah melalui Mesir. Melihat bagan diatas, penulis beranggapan bahwa Turki merupakan *Agresor*, karena Turki lebih banyak melakukan penyerangan terhadap Mesir ketika tujuannya tidak tercapai. Tujuan yang ingin dicapai Turki adalah mampu menguasai Timur Tengah melalui Mesir. Turki melihat banyak peluang dan kesempatan pada Mesir. Peluang dan kesempatan yang dilihat Turki adalah dengan adanya kekosongan pemimpin pasca kudeta Husni Mubarak.

Adanya kekosongan pemimpin inilah presiden Turki Abdullah Gul, mengunjungi Mesir. Kunjungan ini dilakukan atas undangan dari Mohammad Hussein Tantawi yang menjabat sebagai kepala SCAF ketika itu. Dalam kunjungan tersebut, Gul mengeluarkan pernyataannya bahwa Turki datang untuk mendukung masyarakat Mesir dan berbagi pengalaman Turki dengan Mesir (Elbakyan, 2016, hal. 128) Terlebih lagi Turki dan Mesir mempunyai “kedekatan psikologis” pada kekaisaran Ottoman selama empat abad (Shadid, 2011).

Kunjungan tidak hanya dilakukan oleh presiden Turki, melainkan juga dilakukan oleh Perdana Menteri Turki, Tayyip Recep Erdogan pada 13 September 2011. Pada kunjungan tersebut Erdogan ikut berkontribusi untuk menstabilkan politik dan ekonomi Mesir. Erdogan mengajak 6 menteri dan sekitar 200 pebisnis yang ingin membantu dalam bentuk perdagangan, investasi dan keuangan untuk menstabilkan Mesir. Seminggu setelah kunjungan Erdogan, menteri luar negeri Turki juga mengunjungi Mesir. Dalam kunjungannya, Ahmet Davutoglu menyatakan bahwa Turki siap menjadi aliansi strategis antara kedua negara dan reintegrasi kembali dengan tetangga-tetangga Timur Tengah yang merupakan aset bagi kebijakan luar negerinya (Budiana, 2015, hal. 38)

Dilihat dari kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh beberapa pemerintah Turki, cukup jelas bahwa Turki sangat mendukung revolusi yang ada di Mesir. Melalui revolusi ini, Turki menaruh harapan penuh kepada Mesir agar dapat menyebarkan dan memperjuangkan nilai demokrasi di kawasan Timur Tengah melalui Mesir.

Dukungan Turki untuk Mesir juga dipengaruhi dengan adanya perubahan kebijakan luar negeri Turki yang dulunya condong ke Barat menjadi condong ke Timur Tengah yang dikenal dengan *Strategic Depth and Zero Problem* yaitu politik luar negeri yang menggunakan pendekatan multidimensional yang berlandaskan pada pemahaman atas akar sejarah dan posisi *geostrategic*. Maksudnya yaitu Turki lebih menitik beratkan pada hubungan yang seimbang dengan negara-negara disekitarnya. Turki mempunyai ambisi yang kuat untuk menjadi aktor utama dalam melakukan transformasi demokrasi di Timur Tengah. (Budiana, 2015, hal. 7-8). Selain itu, untuk mewujudkan Mesir menjadi negara demokrasi, sesuai dengan

argumen dari Davutoglu sebagai menteri luar negeri Turki yaitu untuk menjadi negara demokrasi, negara membutuhkan ekonomi yang kuat (Shadid, 2011).

Perubahan kebijakan itulah yang menjadikan Turki berusaha untuk menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Tengah. Turki mulai melepaskan diri dari pengaruh Barat dan mulai menggandeng Timur Tengah sebagai mitra untuk memperjuangkan semangat pan-Islamisme Turki. Maka dari itu, Turki mendukung penuh negara Timur Tengah untuk menjadi negara demokrasi terutama Mesir. Karena Turki merasa bahwa Turki telah cukup mampu dan percaya diri untuk dijadikan sebagai contoh negara demokrasi.

Hal tersebut terlihat ketika pemilu, Turki memiliki tradisi persaingan multi-partai. Turki telah melegalkan partai-partai politik oposisi dan mengharuskan pemilihan presiden sejak tahun 1950. Masyarakat Turki yang telah berumur lebih dari 18 tahun memiliki hak untuk memilih (Trial, 2006). Transisi Turki ke demokrasi multi-partai dengan pemilihan umum yang bebas dan adil sejak tahun 1950 adalah perubahan yang baik. Maka dari itu Turki yakin dapat menjadi contoh untuk negara Timur Tengah menjadi negara demokrasi karena Turki sudah 60 tahun menjadi negara demokrasi (Nathalie Tocci, 2011, p. 12).

Turki yang merupakan negara demokrasi sangat mendukung Timur Tengah untuk menjadi negara demokrasi. Hal itu terlihat ketika peristiwa *Arab Spring* tahun 2011, Turki sangat mendukung perubahan sistem pemerintahan di negara Timur Tengah seperti Mesir, Tunisia dan Libya. Turki memberikan dukungan penuh kepada negara-negara yang ingin memerdekakan negaranya dari pemerintahan

yang otoriter. Menurut Turki, pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan ini adalah inti dari politik dan demokrasi. (Yilmaz, 2011, p. 13)

Selain itu, Turki yakin mampu menjadi contoh untuk Timur Tengah khususnya Mesir dalam menerapkan politik Islam dalam bidang ekonomi. Semenjak partai Islam di Turki, yaitu AKP berkuasa, ekonomi Turki mengalami peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Turki naik tiga kali lipat pada tahun 2002 hingga 2011 dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke 17 di dunia. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) Turki diperkirakan akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat pada tahun 2011-2017 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,7 persen (Atasoy, 2014).

Turki juga memberikan penjelasan terkait negara demokrasi. Menurut Turki masyarakat hanya menginginkan pemimpin yang mendengarkan suara rakyat dan melakukan apa yang diinginkan rakyat. Terlebih lagi, pemimpin diharapkan tidak mengabaikan demokrasi. Turki mempunyai keyakinan pada kekuatan demokrasi. Dan berkeyakinan bahwa pemerintah yang mengabaikan masyarakatnya tidak akan bertahan lama pada posisinya. Jika keamanan dikorbankan untuk kebebasan, itu akan menyebabkan kekacauan, sementara jika kebebasan dikorbankan untuk keamanan, itu akan menghasilkan rezim diktator. (Davutoglu, 2014)

Adanya penjelasan terkait demokrasi yang dianut oleh Turki tersebut, Turki melihat peluang diterapkannya di Mesir, menurut Turki apa yang sedang terjadi di Mesir pada tahun 2011 merupakan revolusi untuk menjadi negara yang lebih baik yaitu negara demokrasi. Adanya revolusi tersebutlah yang akhirnya merubah arah

kebijakan luar negeri Turki. Perubahan arah kebijakan politik luar negeri Turki dilatar belakangi oleh prinsip kebijakan luar negeri yang berlandaskan pada visi.

Maka dari itu mengapa Turki ingin merubah arah kebijakannya dan mendukung revolusi yang ada di Timur Tengah, terutama Mesir. Karena menurut Turki, Mesir mempunyai visi yang sama. Selain berlandaskan pada visi, Turki juga menjalankan kebijakan luar negerinya sesuai dengan prinsip. Dengan adanya revolusi yang terjadi di Mesir, Turki menjadi negara yang membantu Mesir melakukan revolusi karena sesuai dengan prinsip politik luar negeri Turki. Yaitu mendukung negara-negara yang ingin menjadi negara demokrasi, pemerintahan yang baik, transparansi dan supremasi hukum. Dan jika keamanan dikorbankan untuk kebebasan, itu akan menyebabkan kekacauan, sementara jika kebebasan dikorbankan untuk keamanan, itu akan menghasilkan rezim diktator. (Davutoglu, 2014)

Berdasarkan visi dan prinsip kebijakan luar negeri Turki, menurut Turki Mesir merupakan negara yang mempunyai visi yang sama dengan Turki. Terlebih pada masa kepemimpinan Muhammad Mursi sebagai presiden Mesir. Turki mempunyai visi untuk melakukan upaya mengembangkan pendekatan bersama pada krisis Suriah dan bergerak bersama dalam sengketa Palestina-Israel. Bermula dari visi yang sama inilah Mesir dibawah Muhammad Mursi diharapkan mampu menjadi “*key ally*” untuk Turki (Yegin, 2016, hal. 6)

Sedangkan dari segi prinsip, Turki mempunyai prinsip untuk membantu negara yang ingin menjadi negara yang lebih baik lagi yaitu negara demokrasi. Turki melihat Mesir merupakan negara yang ingin menjadi negara yang lebih baik

dengan adanya *Arab Spring* pada tahun 2011. Menurut Turki, Mesir perlu mendapatkan bantuan dan dukungan agar dapat menjadi negara demokrasi.

Pada tahun 2012, dilaksanakanlah pemilu di Mesir untuk pertama kali. Pada pemilu tersebut di menangkan oleh Muhammad Mursi dengan jumlah suara sebesar 51,7 persen yang diadakan pada 24 Juni 2012. Setelah terpilihnya Muhammad Mursi, dilaksanakannya upacara peresmian pada 30 Juni 2012. Setelah upacara tersebut, Mursi melakukan kunjungan pertama kenegaraan ke Turki pada akhir September. Dalam kunjungannya tersebut, Mursi mengatakan bahwa rezimnya bersedia untuk mendukung Palestina dan melawan otoritas. (Elbakyan, 2016, hal. 129).

Mendengar pernyataan tersebut, membuat Turki lebih yakin terhadap Mesir bahwa Mesir mampu menjadi “*key ally*” untuk Turki di Timur Tengah. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Mesir inilah dianggap Turki seperti visi yang sedang dijalankan oleh Turki yaitu membebaskan Palestina dari Israel. (Yegin, 2016, hal. 4-5) Selain itu, ternyata kedua negara juga menempatkan permasalahan Palestina-Israel sebagai prioritas utama dalam politik luar negeri masing-masing negara dan menjadikan Palestina sebagai negara merdeka. (Rizal, 2014, hal. 77-78)

Selain itu, antara Erdogan dan Mursi mempunyai latar belakang yang sama yaitu sama-sama lahir dari partai yang berlandaskan Islam. Erdogan dengan partainya *Adalet Ve Kalkinma Partisi* atau Partai Keadilan dan Pembangunan atau (AKP) dan Mursi dengan *Freedom and Justice Party* (FJP). Kedua partai ini sama-sama lahir dari semangat ke Islaman. Visi dari kedua partai ini adalah ingin

melepaskan kediktatoran dan berusaha untuk menjadi negara dengan pemerintahan demokratis dan mengakomodir nilai-nilai Islam di Timur Tengah (Arslantas, 2013).

Selain ideologi yang sama, Turki menganggap bahwa Mursi merupakan mitra yang dapat membantunya meningkatkan pengaruhnya dalam konflik Palestina-Israel. Mesir mempunyai kekuatan untuk mendukung pembebasan Palestina. Hal inilah yang menjadi alasan Turki ingin menjadikan Mesir sebagai *key ally*. Bahkan Israel pun merasa ketakutan dengan Muhammad Mursi dan mengeluarkan pernyataan “sikap Mursi jauh lebih berbahaya dari nuklir Iran” (Nugroho, 2017, p. 75).

Selain menjadikan Mesir sebagai “*key ally*”, Turki bekerja sama dengan Mesir juga atas dasar ekonomi, yang mana Mesir merupakan “*key zone*” untuk mencapai pasar negara-negara teluk Afrika dan Persia. Mesir juga memiliki dampak besar pada pengembangan wilayah Timur Tengah. Karena letak geografis tersebutlah membuat Turki tertarik untuk menjalankan kerja sama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. (Elbakyan, 2016, hal. 125)

Kerjasama ini sangat menguntungkan Turki, mengingat Mesir merupakan negara kaya di Timur Tengah dan memiliki pengaruh di Timur Tengah. Salah satu kerjasama yang dilakukan kedua negara adalah menandatangani kesepakatan tiga tahun Ro-Ro (roll-on/roll-off) yaitu sistem buka tutup jalur menuju pelabuhan Al-Adabiyah di laut merah yang ditandatangani kedua negara pada Maret tahun 2012. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempermudah kedua negara dalam hal transportasi hasil dagang masing- masing negara. (Sari, 2018, hal. 1232)

Perjanjian ini dibuat untuk mengizinkan peti kemas Turki dikirim ke pasar di Teluk Arab melalui pelabuhan Damiatte di pantai utara Mesir. Dari perjanjian ini neraca perdagangan antara kedua negara berjumlah hingga \$ 4,2 miliar pada tahun 2013, dengan ekspor Turki ke Mesir senilai \$ 3,9 miliar dan ekspor Mesir sebesar \$ 300 juta (Alsahary, 2014).

Untuk mewujudkan Mesir menjadi negara demokrasi, Turki terus meningkatkan pengaruhnya di Mesir dengan menghadiri forum ekonomi, Mesir-Turki tahun 2012, yang merupakan gabungan dari pengusaha-pengusaha besar sebanyak 300 perusahaan Turki di Mesir. Dalam forum ini, Mursi mengatakan akan berusaha lebih keras untuk meningkatkan investasi Turki di Mesir (Tank, 2016)

Selain itu, terdapat pula forum bisnis antara Turki dan Mesir yaitu, *Turkiye Odalar Ve Borsalar Birlig* (TOBB) yang diselenggarakan di Turki pada 30 September 2012 dan di hadiri oleh presiden Mesir, Muhammd Mursi dan Menteri Keuangan Mesir Mumtaz Al Said, Menteri Perencanaan dan kerja sama Internasional Asraf El Arabi, Menteri Perdagangan dan Industri Hatem Saleh dan perwakilan dari komunitas bisnis Turki dan Mesir. Dalam forum tersebut, M. Rifat Hisarciklioglu mengatakan dalam pidato pembukanya bahwa forum bisnis ini akan memperkuat hubungan bilateral antara Turki dan Mesir. Dan akan melakukan kerja sama bilateral yang lebih baik dari 20 tahun yang lalu (Chambers, 2012)

Bila melihat apa yang dilakukan oleh Turki terhadap Mesir, Turki merupakan *Agresor* karena Turki melihat adanya peluang dan tujuan. Sesuai dengan parameter terkait *Agresor* yaitu *Agresor* melihat kesempatan dan peluang

yang dapat membantu menjalankan kepentingannya. (Pruitt & Rubin, 2004, hal. 201). Peluang dan kesempatan yang dilihat oleh Turki adalah adanya kekosongan kepemimpinan, antara Turki dan Mesir memiliki visi yang sama dan dalam perdagangan, Mesir merupakan “*key zone*” bagi Turki.

Namun hubungan baik kedua negara tidak berlangsung lama, karena kudeta yang terjadi terhadap Mursi. Mursi dikudeta oleh militer Mesir dan dampak dari kudeta ini adalah memburuknya hubungan antara Turki dan Mesir. Setelah kudeta yang dialami oleh Mursi hubungan kedua negara bersitegang. Hubungan baik antara Turki dan Mesir telah terjalin baik cukup lama. Namun hal tersebut mulai berubah ketika terjadi kudeta yang dialami oleh Muhammad Mursi. Sebagai pendukung Mursi, Turki sangat menolak adanya kudeta tersebut. Bermula dari kudeta tersebutlah hubungan antara Turki dan Mesir mulai memburuk. Banyak tindakan-tindakan yang dilakukan Turki yang merupakan wujud dari penolakan kudeta tersebut.

Alasan hubungan mereka memanas adalah kudeta Mursi yang dilakukan oleh militer Mesir. Setelah jatuhnya rezim Muhammad Mursi, muncullah Abdel Fattah el Sisi, panglima angkatan bersenjata Mesir yang mengambil alih kekuasaan. Abdul Fattah as Sisi yang merupakan panglima militer mengkudeta Muhammad Mursi. Dalam peristiwa kudeta tersebut telah terjadi pembunuhan lebih dari 1.000 orang terhadap pendukung Mursi dan dikenal sebagai Pembantaian Rabaa. Setelah terjadi pembantaian tersebut, Turki meminta Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi pada el Sisi dan meminta jaksa Mesir untuk menempatkan as Sisi di pengadilan. Namun hal tersebut mendapat respon negatif dari Mesir,

Kementerian Luar Negeri Mesir menuduh Turki mengintervensi politik domestik Mesir. (Kotan, 2017)

Turki tidak ingin menerima kepemimpinan as-Sisi karena menurut Turki, as-Sisi bukanlah presiden sah Mesir karena as-Sisi menjadi presiden dengan mengudeta presiden sebelumnya menggunakan militer yang dianggap telah mengotori nilai demokrasi. Alasan Turki menganggap as-Sisi bukanlah pemimpin yang sah ialah, pada saat pemilu kedua setelah jatuhnya Muhammad Mursi, pemerintah menyebut orang Mesir yang tidak berpartisipasi dalam pemilu sebagai pengkhianat bangsa dan akan dijatuhi denda sebesar 500 pound Mesir. Selain itu, pemilu yang diadakan tahun 2014 merupakan bentuk manipulasi dan rekayasa politik yang digelar untuk menjustifikasi kembalinya peran militer Mesir dalam politik (Amri, 2014, pp. 111-113).

Dari pemilu tersebut telah jelas bahwa as-Sisi tidak terpilih secara demokratis dan hal ini juga yang menjadikan Turki tidak mengakui kepemimpinan Abdul Fatah as-Sisi karena dianggap bukan pemimpin Mesir yang sah. As-Sisi telah mengudeta Mursi dengan cara militer dan menjadi pemimpin dengan cara yang tidak demokratis.

Bermula dari kudeta tersebutlah sehingga berdampak pada konflik antara Turki dan Mesir. Konflik tersebut terus bereskalasi karena Turki menggunakan taktik contentious untuk menyerang Mesir dan mencapai tujuannya. Selain itu, konflik ini dipicu karena tidak adanya upaya untuk mengalah dan menyelesaikan konflik bersama. Pada konflik ini, seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa Turki menjadi agresor yaitu pihak yang menyerang dan melakukan berbagai macam

strategi untuk mencapai tujuannya dan menggunakan taktik contentious. Taktik contentious yang dilakukan oleh Turki menggunakan dimensi “ringan-berat”.

Dampak dari kudeta tersebut terlihat ketika Muhammad Mursi sebagai presiden sah Mesir yang dipilih secara demokrasi di kudeta oleh militer Mesir. Muhammad Mursi hanya menjabat sebagai presiden selama satu tahun, yaitu pada tahun 2012-2013. Pada 3 Juli 2013, Mursi dikudeta oleh militer dengan diketuai Abdul Fattah As-Sisi. As-Sisi memberikan ultimatum kepada Mursi selama 48 jam untuk turun dari jabatannya. Setelah jatuhnya rezim Muhammad Mursi, muncullah konflik antara Turki dan Mesir. Jatuhnya rezim Mursi inilah yang memicu awal mula konflik antara Turki dan Mesir terjadi.

Selain itu dari kudeta tersebut terjadi pelanggaran HAM di Mesir. Pendukung Mursi berkumpul di lapangan Rabaa al-Adawiyya untuk membela Mursi, namun di tangkap oleh pasukan keamanan. Lebih dari 1300 orang terbunuh dan hampir 3500 anggota Ikhwanul Muslimin ditangkap dan sebanyak 683 mendapatkan hukuman mati. (Yegin, 2016, hal. 5)

Dari pelanggaran HAM jugalah yang membuat Turki menentang adanya kudeta tersebut. Hal ini juga dikemukakan oleh menteri luar negeri Turki, Ahmet Davutoglu bahwa pemerintah yang dipilih oleh masyarakat harus lengser hanya dengan keputusan masyarakat, sedangkan kudeta militer adalah sebuah tindakan yang tidak diterima. Dengan adanya tindakan kudeta yang dialami Muhammad Mursi, pemerintah Turki tetap menolak kudeta tersebut. (Yegin, 2016, hal. 6)

Namun adanya kudeta bukan tanpa alasan, menurut Mesir kudeta terjadi karena faktor ekonomi dan kepemimpinannya yang ternyata otoriter. Namun alasan

tersebut tidak diterima oleh Turki yang mana Turki merupakan pendukung Mursi dan menjadikan Mesir dibawah kepemimpinan Mursi sebagai key allie yang mampu menyebarkan kepentingannya di Timur Tengah.

Terlebih jika dilihat dari faktor kerja sama antara Turki dan Mesir pada era Muhammd Mursi merupakan kerja sama yang sangat diharapkan oleh Turki. Melalui kerja sama Turki dan Mesir, Turki yakin dapat menyebarkan pengaruhnya di Timur Tengah. Selain itu, Turki dan Mesir pada era Muhammad Mursi mempunyai visi yang sama yaitu ingin membebaskan Palestina dari Israel.

Namun apa yang diharapkan Turki tidak sesuai dengan kenyataan. Berawal dari kudeta inilah hubungan kedua negara menimbulkan konflik. Turki yang beranggapan bahwa kudeta yang dilakukan Mesir ini telah mencorng nilai demokrasi dan Mesir juga mempunyai anggaoan bahwa Mesir pantas untuk di kudeta karena kepemimpinannya yang otoriter. dari konflik yang terjasi antara Turki dan Mesir ini, Turki melakukan beberapa tindakan yang bertujuan untuk menekan Mesir agar mau mengikuti apa yang menjadi tujuan Turki.

2.2 Tindakan Turki Sebagai Agresor

Adanya kudeta yang terjadi di Mesir membuat hubungan antara Turki dan Mesir merenggang. Merenggangnya hubungan kedua negara berdampak pada munculnya konflik. Konflik yang terjadi antara kedua negara ini pun mengalami eskalasi, yang mana dalam teori ini, adanya eskalasi konflik di picu dengan adanya penggunaan taktik *contentious* yang dilakukan oleh Turki terhadap Mesir. Taktik ini akan terus mengalami peningkatan hingga Turki atau Agresor menghentikan

upaya atau mengalah. Namun dalam konflik antara Turki dan Mesir, Turki terus meningkatkan tindakannya sehingga muncullah taktik *contentious*.

2.2.1 Kecaman Turki Terhadap Mesir

Pada 3 Juli 2013, merupakan titik balik hubungan Turki dan Mesir. Hubungan baik yang terjalin sejak lama mengalami perubahan pada saat kudeta Muhammad Mursi. Kudeta yang dialami oleh Mursi merupakan hal yang sangat ditentang oleh Turki. Turki sangat tidak setuju dengan adanya kudeta tersebut hingga Erdogan selaku perdana menteri Turki ketika itu secara terbuka mengatakan

“No Matter where they are... coups are bad. Coups are clearly enemies of democracy. Those who rely on the guns in their hands, those who rely on the power of the media cannot build democracy... democracy can only be built in a ballot box” (Kotan, 2017)

Menurut Turki, kudeta itu buruk, kudeta merupakan musuh demokrasi dan demokrasi bukan tumbuh dari kekuatan militer namun atas kehendak rakyat menggunakan kotak suara. Sedangkan yang dilakukan Mesir adalah mengkudeta pemimpin yang terpilih secara demokrasi.

Selain itu, Turki juga mengatakan bahwa Turki tidak akan pernah menghormati siapapun yang berkuasa melalui kudeta militer. Pernyataan ini dimaksudkan untuk membela Mursi dan Ikhwanul Muslimin yang berada di Turki. Karena menurut Turki, Mursi tidak dapat dikudeta oleh militer karena Mursi merupakan pemimpin sah demokrasi (Reuters, 2013).

Langkah awal yang dilakukan Turki untuk menolak kudeta Muhammad Mursi adalah kecaman-kecaman yang dilontarkan ke publik melalui media dan pidato kenegaraan. Kecaman-kecaman tersebut dilontarkan oleh pemerintahan Turki untuk militer Mesir. Seperti kecaman dari Ahmet Davutoglu mengatakan

bahwa ia menolak dan mengecam kudeta militer yang terjadi di Mesir. Ia mengatakan :

“Leaders who come to power with open and transparent elections reflecting the will of the people can only be removed by elections, that is, the will of the nation. It is unacceptable for a government that has come to power through democratic elections to be toppled through illicit means and even more a military coup” (News, 2013)

Maksud dari pernyataan Davotoglu tersebut adalah bahwa Turki tidak menerima adanya kudeta di Mesir yang dialami oleh Mursi, menurut Davotoglu, Turki tidak menerima pemimpin yang dipilih secara demokrasi harus di lengserkan dengan cara yang terlarang yaitu kudeta militer. Melalui apa yang telah disampaikan oleh Davotoglu, Turki dengan vokal tetap mengecam kudeta yang terjadi di Mesir. pada prinsipnya terkait demokrasi.

Selain itu, kecaman-kecaman yang dilakukan oleh Turki juga mengalami eskalasi, dimana Turki berusaha mencari dukungan pada dunia internasional, terlihat ketika Erdogan berpidato di PBB, ia mengatakan :

“jika kita mempertahankan demokrasi, maka mari kita hormati kotaksuara. Jika kita akan membela mereka yang berkuasa bukan dengan demokrasi tetapi dengan kudeta maka saya bertanya-tanya mengapa PBB ada?” (Georgy, 2014)

Kecaman yang dilontarkan oleh Erdogan ketika berpidato di PBB merupakan upaya Erdogan untuk mencari dukungan dunia internasional dan PBB, Erdogan berharap dengan pidato yang ia ucapkan, ia dapat menerima dukungan yang lebih banyak dan mampu mengembalikan Mursi kepada jabatannya.

Upaya Erdogan tidak terhenti disitu, Erdogan tetap melontarkan kecamannya untuk Mesir. Seperti yang Erdogan katakan :

"Turkey is not against the Egyptian people but against the coup leaders. I will never respect those who come to power through military coups" (East, 2014)

Maksud dari pernyataan yang Erdogan katakan adalah bahwa Erdogan tidak menentang masyarakat Mesir, namun Erdogan menentang militer Mesir yang melakukan kudeta. Erdogan juga menjelaskan bahwa ia tidak akan menghormati dan menerima pemerintahan yang didapatkan dari hasil kudeta.

Kecaman-kecaman yang dilontarkan oleh Turki untuk Mesir juga memiliki alasan, selain menolak adanya kudeta ternyata adalah Turki tidak ingin mengakui kepemimpinan Abdul Fattah as-Sisi yang menjadi presiden setelah mengkudeta Muhammad Mursi. Menurut Turki, as-Sisi tidak terpilih secara demokrasi. Karena pada saat pemilu setelah jatuhnya Muhammd Mursi, pemerintah Mesir menyebut orang Mesir yang tidak berpartisipasi dalam pemilu dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan akan dijatuhi denda sebesar 500 pound Mesir. selain itu, pemilu yang diadakan tahun 2014 merupakan bentuk manipulasi dan rekayasa politik yang digelar untuk mengembalikan peran militer Mesir dalam politik. (Amri, 2014, hal. 111-113)

Kebencian Turki terhadap as-Sisi pun semakin terlihat ketika Erdogan mengecam tindakan as-Sisi yang mengambil alih kekuasaan dengan cara militer hingga mengeluarkan pernyataan dalam pers konferen :

"I consistently say on the international platform, that I do not accept Sisi as President. Today I also say the same thing. For me, the President of Egypt, is not Sisi, but still Muhammad Mursi " (Team, 2015)

Pernyataan di atas sangat menjelaskan betapa menolaknya Erdogan atas kepemimpinan as-Sisi. Menurut Erdogan, apa yang telah dilakukan oleh as- Sisi sudah tidak bisa dimaafkan dan Erdogan tidak mengakui as-Sisi

sebagai presiden Mesir, menurutnya presiden Mesir tetaplah Muhammad Mursi, seseorang yang terpilih secara demokrasi menjadi presiden.

Terdapat pula pernyataan Erdogan yang mengatakan bahwa ia tidak akan berbicara dengan as-Sisi hingga as-Sisi membebaskan Ikhwanul Muslimin yang dipenjara, selama mereka belum dibebaskan Erdogan tidak akan berbicara dengan as-Sisi karena menurut Erdogan as-Sisi adalah "tirani ilegal" yang tidak perlu diakui kepemimpinannya (Aljazeera, 2019)

Peristiwa yang terjadi di Mesir sebenarnya sangat disayangkan oleh Turki, karena dengan adanya kudeta akan berakibat sangat buruk pada rakyat dan akan memperburuk keadaan dalam negeri, dalam segi ekonomi, politik, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dampak dari kudeta sangatlah besar dimana suatu negara akan membutuhkan bantuan luar negeri untuk menstabilkan negaranya kembali. (Sari, 2018, hal. 1245)

Kecaman yang dilakukan Turki dengan mengatakan bahwa as-Sisi merupakan pemimpin yang tidak sah dan merupakan kepemimpinan otoriter dikuatkan dengan pernyataan as-Sisi yang mengakui bahwa banyak kesempatan Mesir menjadi negara demokrasi, namun ia tidak akan melakukan hal tersebut selama ekonomi Mesir masih lemah. (Habtoor, 2017)

Dukungan Turki untuk Mesir terbilang cukup vokal, dimana Turki berusaha melakukan kecaman-kecaman agar Mesir mengalah untuk Turki dan Turki pun juga mencari dukungan internasional melalui PBB. Apa yang dilakukan oleh Turki ini dapat diartikan sebagai ancaman agar Mesir mengembalikan kepemimpinan Mursi yang dianggap Turki sebagai

kepemimpinan yang sah. Namun Mesir tidak ingin melakukan hal tersebut, dengan begitu Turki berusaha menggunakan cara lain untuk melawan Mesir.

2.2.2 Pemutusan Hubungan Diplomatik

Setelah beberapa kecaman-kecaman yang dilontarkan Turki untuk Mesir, Turki melihat respon Mesir yang melakukan tindakan dengan mengusir duta besar Turki dari Kairo. Melihat reaksi Mesir, Turki melakukan tindakan yang sama yaitu mengusir duta besar Mesir dari Ankara yang berdampak pada pemutusan hubungan diplomatik. Pengusiran ini adalah wujud pembalasan dari Turki karena Mesir telah mengusir kedutaan besarnya pada tanggal 23 November 2013. Keputusan ini dianggap keputusan yang paling benar menurut Turki karena sudah tidak ingin bekerja sama dengan Mesir yang dipimpin oleh pemerintahan yang tidak sah dan tidak terpilih secara demokrasi yaitu Abdul Fattah as-Sisi (Daily, 2013)

Setelah adanya pengusiran duta besar yang dilakukan oleh Mesir, Turki juga melakukan hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Erdogan bahwa Turki akan membalas perbuatan Mesir dengan ikut mengusir kedutaan besar Mesir dari Ankara dan di beri waktu hingga 29 November 2013. (Masr, 2013) Setelah pengusiran kedutaan besar, kedua negara sudah tidak lagi menjalin hubungan baik, kedua negara sama-sama tidak ingin mengalah dan menjalin hubungannya kembali.

Faktor yang mempengaruhi adanya konflik dan terjadi pemutusan hubungan diplomatik salah satunya adalah pertentangan kebijakan politik antara Turki dan Mesir. Terjadinya perubahan rezim dari pemerintahan sipil kembali ke pemerintahan militer membuat Turki enggan untuk melakukan hubungan diplomatik. (Sari, 2018, hal. 1243)

Selain itu, pemutusan hubungan diplomatik diantara kedua negara juga dikarenakan kebijakan as-Sisi terhadap Ikhwanul Muslimin. Menurut Sisi Ikhwanul Islamis merupakan organisasi teroris dan dianggap sebagai Islam ekstrimis dan membatasi atau bahkan melarang aktivitas Ikhwanul Muslimin di Mesir. . (Ayoob, 2018)

2.2.3 Pemutusan Bantuan dan Kerja sama

Ternyata tidak hanya kecaman dan pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Turki, Turki juga melakukan pemutusan bantuan ekonomi dan kerja sama diantara kedua negara. Pemutusan bantuan Turki adalah penangguhan atas kesepakatan bantaun Turki kepada Mesir sebanyak \$ 2 miliar untuk bantuan pembangunan.

Sedangkan pemutusan kerja sama yang dilakukan Turki adalah pemutusan untuk tidak memperpanjang perjanjian perdagangan bebas antara Turki dan Mesir yang akan berakhir pada tahun 2015. Perjanjian tersebut adalah perjanjian Ro-Ro (roll on/roll-off) yang merupakan sistem buka tutup jalur menuju pelabuhan Al-Adabiyah. (Sari, 2018, hal. 1232)

Dengan adanya konflik kudeta ini, dan pemutusan kerja sama ekonomi, volume perdagangan ekonomi antara Turki dan Mesir mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi perekonomian Turki dibandingkan dengan Mesir yang lebih mendapatkan kerugian. Menurut Bank Dunia, ekonomi Turki adalah \$ 768 miliar dan perdagangan luar negerinya \$ 400 miliar sedangkan Mesir mencapai \$ 257 miliar atau dua pertiga dari perekonomian Turki. Dalam konflik ini, terkait pemutusan kerja sama ekonomi, Mesir lebih rugi bila dibandingkan

dengan Turki karena sebagian sektor ekonomi utama, investasi turun dan utang meningkat setelah kudeta (Bakeer, 2013).

Sedangkan kerjasamakerja sama dalam bidang perdagangan dan transportasi, sebuah bus perusahaan Turki membatalkan pengiriman 600 unit bus ke Mesir (Galal, 2013). Dan dalam bidang pertahanan, Turki menghentikan pengiriman kendaraan udara tanpa awak buatan Turki atau disebut ANKA ke Mesir dan juga Turki membatalkan latihan gabungan angkatan laut dengan tentara Mesir yang akan dilaksanakan pada tahun 2013. Pembatalan ini juga telah disampaikan oleh presiden Turki, Abdullah Gul :

“we have made the decision on the cancellation of the naval exercise planned to be conducted with Egypt” (News H. D., 2013)

Yang secara terbuka mengatakan telah membatalkan pelatihan angkatan laut antara Turki dan Mesir.

Melalui tiga taktik yang dianggap sebagai taktik *contentious* yang diberikan oleh Turki, ternyata tidak membuahkan hasil. Digunakannya taktik *contentious* oleh Turki ternyata berdampak pada eskalasi konflik diantara kedua negara. Eskalasi akan semakin berlanjut hingga sang agresor menang atau menghentikan upayanya. Namun dalam konflik Turki dan Mesir, Turki tidak ingin berdamai dengan Mesir, namun Turki telah menghentikan upayanya terhadap Mesir. Namun upaya tersebut bukanlah reaksi mengalah dari Turki, namun Turki tetap pada pendiriannya bahwa sampai kapanpun Turki tidak akan menerima kepemimpinan as-Sisi dan jika ingin normalisasi hubungan antara keduanya harus membebaskan Mursi dari tahanan.

“saya secara konsisten mengatakan pada internasional, bahwa saya tidak menerima Sisi sebagai presiden. Hari ini saya juga mengatakan hal yang sama. Bagi saya, presiden Mesir bukanlah Sisi, tapi Muhammd Mursi”
(Team, 2015)

Di kancah internasional pun Erdogan secara berani dan terang-terangan menolak kepemimpinan as-Sisi dan masih menganggap Mursi sebagai presiden Mesir dan ingin Mursi dan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dibebaskan dari tahanan.

Untuk menjadi seorang agresor, selain melihat adanya kesempatan, peluang dan tujuan, mereka juga akan menggunakan taktik-taktik *contentious*. Taktik ini biasanya dilakukan dengan menggunakan dimesni “ringan-berat”. Taktik ringan yaitu taktik yang konsekuensinya bersifat netral, sedangkan taktik berat yaitu akan berupa ancaman bagi negara lawan dan akan menimbulkan kerugian. Transisi dari taktik berat ke taktik ringan merupakan upaya bahwa suatu pihak sedang berudaha meraih kemenangan atas pihak lainnya. (Pruitt & Rubin, 2004, hal. 100)

Seperti ysng telah dijelaskan di atas, bahwa Turki melakukan tindakan-tindakan *contentious* karean melihat bahwa apa yang menjadi tujuannya tidak akan tercapai setelah adanya kudeta yang dialami Muhammad Mursi di Mesir. untuk menyerang Mesir, Turki berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan *contentious*. Taktik yang digunakan oleh Turki yaitu dengan dimensi “ringan-berat”.

Tindakan pertama yang dilakukan Turki adalah dengan melakukan kecaman dan tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang tidak memiliki resiko tinggi. Namun melalui kecaman ternyata tidak membuat Mesir mengalah dan mengembalikan kekuasaan Mursi. Melihat hal tersebut, Turki meningkatkan

tindakannya dengan mengusir duta besar Mesir dari Ankara dan tindakan ini dapat dikatakan tidak berhasil karena Mesir tidak kunjung mengikuti keinginan Turki. melihat tersebut, akhirnya Turki meningkatkan tindakannya dengan melakukan pemutusan bantuan dan kerja sama. Tindakan ini diharapkan mampu membuat Mesir melaksanakan apa yang menjadi tujuan Turki yaitu mengembalikan Mursi pada jabatannya. Namun apa yang diinginkan oleh Turki tidak tercapai. Mesir dengan keyakinannya sendiri tetap mengukudeta Mursi dari jabatannya.

